

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/ RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/ RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra PD.

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Provinsi Riau yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau. Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang wajib disusun/ ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau merupakan yang salah satu Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga perlu menyusun/ menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014- 2019.

Visi adalah cara pandang kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran yang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang.

Dengan mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Provinsi Riau maka visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, yaitu:

**“TERWUJUDNYA TATA NIAGA, KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH
YANG SEHAT dan MANDIRI SERTA MEMPUNYAI DAYA SAING”**

Penjelasan makna visi sebagai berikut :

Sehat : Dalam arti prinsip – prinsip tata niaga/perdagangan, koperasi dan kaidah bisnisnya. Apabila digambarkan adalah suatu kondisi atau keadaan tata niaga yang sehat yaitu transaksi yang meningkat, lancar distribusi, selanjutnya koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi.

Mandiri : Dalam arti Kinerja Usaha Yang Semakin Mandiri, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.

Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau memiliki konsistensi untuk menjabarkan Visi Misi Provinsi Riau khususnya misi ke-4 (empat) yaitu Menurunkan Kemiskinan dan ke-9 (sembilan) yaitu Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan. Sebelumnya Dinas Koperasi dan UKM terkait dengan misi ke 4 dan 5 RPJMD. Sedangkan Dinas Perindustrian dan perdagangan terkait dengan misi ke 4. Perubahan keterkaitan visi telah disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Riau.

Misi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau merupakan upaya untuk mencapai visi tersebut diatas. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah Provinsi Riau melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan misi-misi sebagai berikut:

1. Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Provinsi Riau Yang Berkualitas, Mempunyai Daya Saing dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau
2. Mewujudkan Tata Niaga/Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Yang Berkualitas, Mempunyai Daya Saing dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 4) Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- 5) Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 6) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 7) Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 8) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Nasional
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah.
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 15) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang diterbitkan sebagai penyempurnaan dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1 tahun 2002 tentang hal sama.

- 16) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Riau
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019
- 19) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2016.
- 20) Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun 2016.
- 21) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
- 22) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau
- 23) Surat Edaran Nomor 85/SE/2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan penyusunan Renja adalah agar proses pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam perencanaan Tahunan lebih terarah dan terpadu untuk menentukan kegiatan yang tepat dan bermanfaat dengan mengelola sumber daya yang ada agar tercapai tujuan pembangunan yang sesuai harapan, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja SKPD Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau adalah;

- Dalam rangka upaya meningkatkan peran dan fungsi perencanaan perdagangan, Koperasi dan UKM terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) program/kegiatan perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Riau.
- Sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2016 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Riau.
- Sebagai Arah dan acuan pelaksanaan Program kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 mengacu Kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB. I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan

Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

1.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV : PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau serta Capaian Renstra SKPD

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tersebut menjelaskan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang

- Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh Sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tersebut menjelaskan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Sekretariat

Sekretariat terdiri dari Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum dan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum, dan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum

Adapun tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum;
- c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/ kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- h. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- i. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- j. Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- k. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- l. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi
- m. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;

- n. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- o. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- p. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- q. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- r. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;

- f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
- l. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi dan Logistik, Seksi Pengembangan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dan Seksi Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis. Bidang Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi dan Logistik

Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi dan Logistik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi dan Logistik;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi dan Logistik;
- c. Melaksanakan pengelolaan data Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;
- d. Melaksanakan rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol dan bahan berbahaya;
- e. Melaksanakan fasilitasi usaha dagang kecil dan menengah dan toko modern;
- f. Melaksanakan fasilitasi standar pasar rakyat;
- g. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi;
- h. Melakukan pengembangan pusat distribusi Nasional dan pusat distribusi Provinsi Riau;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- j. Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis revitalisasi pasar rakyat;

- k. Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku pasar rakyat;
- l. Melaksanakan pengolahan dan analisis data usaha dan sarana perdagangan;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
- n. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan system informasi perdagangan dan penyusunan informasi usaha di sektor perdagangan;
- o. Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha;
- p. Melaksanakan identifikasi dan pembinaan terhadap agen/distributor dan asosiasi;
- q. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi dan Logistik; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Seksi Pengembangan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- c. Melaksanakan sistem resi gudang;
- d. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi peningkatan Produksi Dalam Negeri skala Provinsi;

- e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan akses pasar Usaha Dagang Kecil Menengah dan Kemitraan;
- f. Melaksanakan fasilitasi pemberian dukungan dan bantuan sarana penumbuhan, pembinaan dan pengembangan pasar produk daerah;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk kegiatan misi dagang, pasar lelang, pameran, dan dukungan informasi pengembangan pasar produk daerah;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis

Seksi Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis;
- c. Melaksanakan pemetaan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d. Melaksanakan pemantauan dan monitoring harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting;
- e. Melaksanakan sistem informasi harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting;
- f. Melaksanakan fasilitasi stabilitas harga (pasar murah dan operasi pasar);

- g. Melaksanakan pengawasan pupuk bersubsidi dalam pengadaan dan penyaluran di tingkat distributor dan pengecer;
- h. Melaksanakan pembinaan manajemen distribusi pupuk ditingkat distributor dan pengecer;
- i. Melaksanakan inventarisasi dan pembinaan pelaku usaha khususnya distributor/ pedagang besar pemasok bahan pokok dan barang penting;
- j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan ketersediaan, kelancaran distribusi dan kestabilan harga bahan pokok masyarakat;
- l. Melaksanakan sidak dan pembinaan kepada pelaku usaha atau distributor dalam menjaga stok dan pasokan dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan.
- m. Memberikan dukungan serta kerjasama dalam rangka pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah bahan kebutuhan pokok masyarakat;
- n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan Luar Negeri

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Promosi dan Kerjasama, Seksi Informasi dan Analisis Pasar, dan Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor. Bidang Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perdagangan Luar Negeri;

Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perdagangan Luar Negeri; Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi dan Kerjasama

Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi dan Kerjasama;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi dan Kerjasama;
- c. Melaksanakan pemberian layanan informasi promosi dan kerjasama luar negeri;
- d. Melaksanakan fasilitasi promosi produk dan citra skala internasional lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau;
- e. Melaksanakan penilaian kinerja pelaku ekspor;
- f. Melaksanakan fasilitasi akses pasar produk ekspor;
- g. Melaksanakan kerjasama Internasional Trade Promotion Center atas perdagangan dan perwakilan dagang luar negeri lainnya;
- h. Menyelenggarakan pameran dagang Internasional, pameran dagang Nasional dan pameran dagang Lokal;
- i. Melaksanakan misi dagang bagi produk ekspor Provinsi Riau;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Promosi dan Kerjasama; dan

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Informasi dan Analisis Pasar

Biro Seksi Informasi dan Analisis Pasar mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Informasi dan Analisis Pasar ;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Informasi dan Analisis Pasar;
- c. Menyediakan data dan informasi komoditi ekspor dan impor skala provinsi;
- d. Melaksanakan fasilitasi informasi kebijakan pasar tujuan ekspor;
- e. Melaksanakan analisis perkembangan ekspor dan impor skala provinsi;
- f. Melaksanakan fasilitasi penyediaan data dan informasi komoditi ekspor impor;
- g. Melaksanakan analisis peluang pasar tujuan ekspor;
- h. Melaksanakan penyusunan database eksportir importir dan buyer potensial;
- i. Menyelenggarakan publikasi pencitraan produk ekspor skala nasional;
- j. Melaksanakan pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- l. Melaksanakan fasilitasi pameran produk ekspor;
- m. Melaksanakan Bimbingan teknis kepada calon/ pelaku usaha eksportir;
- n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Informasi dan Analisis Pasar; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor

Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor;
- c. Melaksanakan pemberian informasi kebijakan ekspor dan impor bagi eksportir dan importir;
- d. Melaksanakan fasilitasi penyediaan sistem informasi ekspor dan impor;
- e. Melaksanakan pembinaan prosedur ekspor dan impor;
- f. Melaksanakan verifikasi proses ekspor dan impor;
- g. Melaksanakan pengelolaan Surat Keterangan Asal untuk barang ekspor Indonesia;
- h. Melaksanakan pengelolaan surat persetujuan ekspor dan rekomendasi pengajuan ekspor;
- i. Melaksanakan pengelolaan Angka Pengenal Impor;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada

Seksi Pendaftaran dan Hukum, Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan, dan Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pendaftaran dan Hukum

Seksi Pendaftaran dan Hukum mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pendaftaran dan Hukum;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendaftaran dan Hukum;
- c. Melaksanakan penghimpunan dan analisis berkas permohonan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- d. Melaksanakan analisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam koperasi, pembukaan kantor cabang koperasi, cabang pembantu koperasi dan kantor kas koperasi;

- e. Melaksanakan verifikasi pembentukan koperasi, pembubaran koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembukaan kantor cabang koperasi dan memproses pemberian izin usaha koperasi simpan pinjam;
- f. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan terhadap kasus yang terkait dengan koperasi;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pendaftaran dan Hukum; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan

Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan;
- c. melaksanakan pembinaan kelembagaan pada organisasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data keragaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. melaksanakan inventarisasi kebutuhan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. melaksanakan bimbingan teknis bagi anggota koperasi dalam peningkatan tatakelola kelembagaan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Melaksanakan analisis kebijakan penerapan tatakelola kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penerapan sanksi;
- e. Melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
- f. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan/audit kelembagaan bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima fasilitas pembiayaan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan, Seksi Promosi dan Jaringan Usaha, dan Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Kewirausahaan

Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
- c. Melaksanakan pengembangan kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha dari kecil menjadi menengah;
- d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang produksi, distribusi dan pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan kewirausahaan, akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi dan Jaringan Usaha

Seksi Promosi dan Jaringan Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan perancangan akses pasar bagi produk koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan fasilitasi kontrak bisnis, temu usaha, dan kemitraan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha.; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan

Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- c. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah melalui akses pembiayaan dan permodalan;
- d. Melaksanakan pengumpulan, analisis data dan informasi pembiayaan dan permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;

- e. Melaksanakan monitoring fasilitas permodalan yang diterima koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Komposisi dan jumlah personil lingkup Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, tergambar pada table berikut ini :

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	GOLONGAN							JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	DIII	S-1	S-2	S-3	
1	LAKI-LAKI	3	-	32	-	32	9		76
2	PEREMPUAN	1	-	25	8	35	10		79
JUMLAH									155

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Perjenjangan

NO	JENIS KELAMIN	ADUM/ PIM IV	SPAMA/ PIM III	SPAMEN/ PIM II	SPATI/ PIM I	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	29	18	1		48
2	PEREMPUAN	27	12			39
JUMLAH						87

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Eselon

NO	JENIS KELAMIN	ESELON				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	LAKI-LAKI		1	7	14	22

2	PEREMPUAN			3	13	16
JUMLAH		-				38

Tabel Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

NO	JENIS KELAMIN	GOLONGAN				JUMLA H
		I	II	III	IV	
1	LAKI-LAKI	1	10	47	15	73
2	PEREMPUAN	1	7	66	8	82
JUMLAH						155

**2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Provinsi Riau Tahun 2016**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau untuk TA. 2016:

No	Program / Kegiatan	Realisasi	
		Fisik	Keu
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	100%	71.81%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	67,25%
3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99.99%
4	Penyediaan alat tulis kantor	100%	100%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	98.95%
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan	100%	99.73%

No	Program / Kegiatan	Realisasi	
		Fisik	Keu
	Perundang-undangan		
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	100%	70.43%
9	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%	73.76%
10	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi Publikasi Dan Kehumasan SKPD	100%	72.49%
11	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	100%	99.97%
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	83.5%
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	98.1%
3	Peningkatan Kapasitas, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	100%	87.51%
4	Peningkatan Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor UPT Pusat Pelayanan Terpadu	100%	81.41%
C	Program peningkatan disiplin aparatur		
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	98.63%
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	100%	94.3%
3	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	100%	98.93%
4	Pengadaaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya	100%	99.44
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		

No	Program / Kegiatan	Realisasi	
		Fisik	Keu
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0%	0%
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100%	59.26%
3	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	50%	46.23%
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	81%	80.98%
2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	60%	17.8%
3	Rapat Koordinasi pada Setiap SKPD	100%	65.89%
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	65%	27.04%
5	Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD	-	-
F	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif		
1	Monitoring Dan Evaluasi Dan Diseminasi Terhadap KUMKM Penerima Dana Bergulir	71%	70.44%
2	Penyediaan Peralatan Pembuat Mie	0%	0%
3	Penyediaan Alat Tenun	0%	0%
4	Penyediaan Alat Pembuat Kemasan (packing)	0%	0%
5	Koordinasi Aksespermodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat	100%	63.89%
6	Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Pengurus / Pengelola Koperasi	0%	0%
G	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		
1	Pameran Dalam Rangka Hari Koperasi Tingkat Nasional	82%	81.79%

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Realisasi	
		Fisik	Keu
2	Pameran Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo)	90%	89.68%
3	Pameran Dalam Rangka Hari Koperasi Tingkat Provinsi Riau	60%	57.54%
4	Pameran SMESCO UKM	0%	0%
5	Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)	100%	96.4%
6	Pemberian Informasi Penyelenggaraan Kewirausahaan Dan Pengembangan Sistem Pendukung Di UMKM Melalui Media Cetak	0%	0%
7	Penyuluhan Kepada Lembaga Keuangan Mikro	80%	77.63%
8	Monitoring Dan Evaluasi Bansos	63%	62.37%
9	Temu Usaha Antara Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Usaha Besar Dan Usaha Lainnya	0%	0%
10	Monitoring, Evaluasi Dan Pendataan Bagi KUMKM Baik Koperasi Primer Maupun Sekunder	0%	0%
11	Pameran Produk-produk Unggulan Khas Daerah	100%	76.27%
H	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		
1	Pembinaan Usaha Koperasi Dalam Pengembangan Komoditi Potensial	0%	0%
2	Pengembangan Usaha Koperasi Melalui Penyediaan Sarana Peralatan Produksi	0%	0%
3	Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Kab/kota Se Provinsi Riau	0%	0%

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
PROVINSI RIAU**

No	Program / Kegiatan	Realisasi	
		Fisik	Keu
4	Pemeringkatan Koperasi Terhadap 150 Koperasi Di Provinsi Riau	0%	0%
5	Monitoring, Evaluasi Data Keragaan Koperasi Kab/kota Se Provinsi Riau	92%	91.35%
6	Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi Dan Pembina Koperasi Berprestasi	85%	84.51%
7	Identifikasi Koperasi Badan Hukum Tingkat Provinsi Riau	81%	80.98%
8	Peningkatan Kualitas Organisasi Dan Badan Hukum Koperasi	60%	56.15%
9	Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM	81%	80.72%
10	Koordinasi Regional Dan Nasional	75%	70.41%
11	Pembinaan Administrasi Koperasi Simpan Pinjam	100%	65.78%
12	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam	57%	42.55%
13	Temu Usaha Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam	72%	71.36%
14	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam	35%	34.88%
15	Diklat Akuntansi	100%	90.4%
16	Diklat Perkoperasian	100%	97.18%
17	Diklat Pengawas Koperasi	100%	89.46%
18	Diklat Kewirausahaan	100%	92.74%
19	Diklat Perpajakan	100%	94.91%
20	Peningkatan Pembinaan melalui Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	100%	92.68%
21	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan	81%	80.1%

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Realisasi	
		Fisik	Keu
	Menengah		
H	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan		
1	Pelatihan Kerajinan Rumah Tangga (Home Industri) bagi Kelompok Pengrajin dalam Peningkatan Usaha Kelompok di Daerah	100%	95.11%
2	Temu Konsolidasi Data dan Pemberdayaan UKM	100%	93.12%
3	Pelatihan Kerajinan Bordir bagi Wanita dan Ibu Rumah Tangga Kelompok Pengrajin dalam Peningkatan Usaha Kelompok di Daerah	0%	0%
4	Peningkatan Mutu Kemasan (Packaging) Produk Unggulan se Provinsi Riau	50%	47.64%
5	Pelatihan Sablon, Peningkatan Keterampilan dan Bantuan Komputer bagi Kelompok Pemuda Tidak Sekolah/Tidak Melanjutkan Kuliah	0%	0%
6	Workshop Wirausaha	100%	68.82%
7	Penyediaan dan Pengembangan Sarana untuk Usaha Koperasi dan UMKM provinsi Riau	73%	72.24%
8	Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM melalui Penyediaan Sarana Publikasi	0%	0%
9	Pengadaan Klinik Desain Kemasan	12%	11.2%
10	Peningkatan Galeri PLUT-KUMKM Provinsi Riau	60%	58.83%
11	Pembuatan dan Pencantuman Label Barcode bagi Produk Unggulan UMKM	63%	78.16%
12	Konsultasi Bisnis dan Teknis untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau	62.5%	44.57%

2.1.2. Capaian Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau (Berdasarkan Indikator Sasaran Renstra)

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau Tahun 2016 dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap).

Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setaip sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

TABEL :
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2016

NO	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Peningkatan Jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam Pertumbuhan Perekonomian di Provinsi Riau	Jumlah Pertumbuhan dan Peningkatan Koperasi di Provinsi Riau	5.256 unit	5.342 unit	101%
2. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UMKM di Provinsi Riau	Jumlah Pertumbuhan UMKM di Provinsi Riau	544.281 unit	535.139 unit	99%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
--------------------------	--------------------------	---------------	------------------	----------

2. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam Pertumbuhan Perekonomian di Provinsi Riau

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Pertumbuhan dan Peningkatan Koperasi di Provinsi Riau	5.256 unit	5.342 unit	101%

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Pada tahun 2016, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau menargetkan Capaian Peningkatan Koperasi sebanyak 101 %. Namun sepanjang tahun 2016, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau telah melakukan beberapa Program dan Kegiatan kegiatan untuk mendukung sasaran strategis tersebut :

1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Data Keragaan Koperasi Kab/kota Se Provinsi Riau

Hal ini perlu dilakukan untuk melihat implementasi kegiatan yang telah dilakukan dan hasilnya merupakan bahan evaluasi dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembinaan koperasi dan menetapkan berbagai kebijakan pembangunan koperasi yang sangat diperlukan untuk terpeliharanya kehidupan berkoperasi di masyarakat sehingga terpantaunya perkembangan koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi Riau baik dari segi jumlah Koperasi, status koperasi, aktif/tidak aktif, susunan pengurus koperasi dan pengawas koperasi.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 92%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp. 122.038.000 atau 91.35%.

2. Kegiatan Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Pembina Koperasi Berprestasi

kegiatan ini bertujuan Tereksposnya pencapaian berbagai prestasi Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi Riau dengan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kontribusi yang telah dilakukan oleh pembina Koperasi dan apresiasi kepada koperasi yang telah mampu menjalankan aktivitas kelembagaan dan usahanya sekaligus sebagai dorongan dan motivasi agar koperasi tersebut dapat berperan lebih baik dalam mensejahterakan anggotanya.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 85%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.177.910.701,- atau 84,51%.

3. Kegiatan Identifikasi Koperasi Badan Hukum Tingkat Provinsi Riau

Dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan koperasi perlu verifikasi ke lapangan baik dalam pendirian, pembukaan kantor cabang dan perubahan anggaran dasar koperasi, menghimpun koperasi badan hukum yang baru keluar dan koperasi yang mempunyai permasalahan

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 81%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.164.056.000,- atau 80.98%.

4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Organisasi Dan Badan Hukum Koperasi

Kegiatan ini terdiri dari peningkatan kualitas organisasi melalui penyuluhan pendirian koperasi dan verifikasi pendirian Koperasi, verifikasi perubahan anggaran dasar, verifikasi kantor cabang serta terhimpunnya data koperasi yang bermasalah di Kabupaten/Kota sehingga Koperasi yang berdiri sesuai dengan aturan

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 60%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.79.109.527,- atau 56,15%.

6. Kegiatan Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM

Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM dilaksanakan adalah untuk koordinasi penyusunan program KUMKM yang bersumber dari dana APBD dan APBN serta untuk menyelaraskan usulan program KUMKM antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota sehingga terdapat persepsi yang sama untuk menyukseskan program koperasi dan UMKM Provinsi Riau.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 81%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.34.321.000,- atau 80,72%.

7. Kegiatan Koordinasi Regional Dan Nasional

Koordinasi Regional dan Nasional yang dilaksanakan adalah untuk koordinasi penyusunan program KUMKM yang bersumber dari dana APBD dan APBN serta untuk menyelaraskan usulan program KUMKM antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota sehingga terdapat persepsi yang sama untuk menyukseskan program koperasi dan UMKM Provinsi Riau.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 75%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.16.553.210,- atau 70,41%

8. Pembinaan Administrasi Koperasi Simpan Pinjam

Pembinaan Administrasi Koperasi Simpan Pinjam, dengan capaian terlaksananya kegiatan meningkatnya pengetahuan pengawas dan pengelola koperasi tentang administrasi koperasi simpan pinjam dan meningkatnya kesadaran pengelola KSP untuk melaksanakan administrasi dan pembukuan dengan baik sehingga tertatanya manajemen pengelolaan koperasi.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.160.376.999,- atau 65,78%.

9. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam sehingga dapat diketahui tingkat

kesehatan, tingkat kemampuan KSP dan perkembangan pelaksanaan usaha KSP, sehingga meningkatnya kepercayaan anggota dan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 57%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.83.001.000,- atau 42,55%

10. Temu Usaha Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam

Temu Usaha Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam, terlaksananya Temu usaha Koperasi Simpan Pinjam sehingga dapat meningkatkan Pengetahuan pengurus/pengelola KSP/USP Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 72%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.113.850.000,- atau 71,36%

11. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam

Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam, terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam sehingga dapat diketahui perkembangan KSP/USP dan Adminstrasi pada Koperasi Simpan Pinjam

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 35%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.62.159.818,- atau 34,88%

12. Kegiatan Diklat Akuntansi

Diklat Akuntansi, terlaksananya pelatihan Akuntansi koperasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus/ pengelola dan pengawas koperasi di bidang akuntansi agar dapat

mengimplementasikannya, karena setiap tahunnya koperasi harus melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggota dan pihak tertentu dalam menjalankan usaha koperasi. Dalam kenyataannya koperasi sering terlambat bahkan ada yang tidak melaksanakan RAT karena pengurus/pengelola dan pengawas belum atau masih kurang memahami dalam membuat pembukuan secara baik dan benar agar RAT dapat dilakukan tepat waktu.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.199.870.000,- atau 90,4%.

13. Kegiatan Diklat Perkoperasian

Diklat Perkoperasian, terlaksananya Diklat Perkoperasian untuk meningkatkan pengetahuan pengurus dan petugas penyuluh Koperasi lapangan (PPKL) di bidang perkoperasian dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan koperasi, memunculkan banyak koperasi-koperasi baru yang membutuhkan pengetahuan tentang perkoperasian dan seiring dengan pertumbuhan koperasi tersebut diperlukan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.247.500.500,- atau 97,18%.

14. Diklat Pengawas Koperasi

Diklat Pengawas Koperasi, telah dilaksanakannya Diklat Pengawas Koperasi untuk pengurus dan petugas penyuluh Koperasi lapangan (PPKL) di bidang pengawasan koperasi dengan tujuan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang pelaksanaan pengawasan koperasi sehingga pengawas koperasi harus memiliki akuntabilitasnya

dalam mengawasi, memberikan arahan serta mampu menganalisa laporan keuangan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.134.183.000,- atau 89,46%.

15. Kegiatan Diklat Kewirausahaan

Diklat Kewirausahaan, telah dilaksanakan Diklat Kewirausahaan bagi wirausaha kecil dalam mendapatkan wawasan dan keterampilan dan mental untuk membuka usaha sebagai solusi untuk menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilannya dalam manajemen usaha

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.82.521.000,- atau 92,74%.

16. Kegiatan Diklat Perpajakan

Diklat Perpajakan, telah dilaksanakannya Diklat perpajakan untuk meningkatkan wawasan Pengurus dan pengelola koperasi dalam bidang perpajakan koperasi. Untuk Tahun 2016 UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Riau telah melaksanakan Diklat dengan jumlah peserta sebanyak 260 orang.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.172.837.000,- atau 94,91%.

17. Kegiatan Peningkatan Pembinaan melalui Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

Peningkatan pembinaan melalui dukungan petugas penyuluh Koperasi lapangan (PPKL). Tersedianya Tenaga penyuluh koperasi lapangan 175

orang dengan rincian di setiap kecamatan 1 (satu) orang se provinsi Riau (163 orang) dan 1 (satu) orang koordinator PPKL di Kabupaten/Kota (12 orang), dengan adanya tenaga PPKL tersebut dapat meningkatkan intensitas pembinaan kepada koperasi di daerah. Keterbatasan SDM aparatur pembina provinsi dan kabupaten/kota baik secara kuantitas maupun kualitas, menjadi kendala untuk dapat melakukan pembinaan secara menyeluruh kepada koperasi yang ada.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.3.433.896.600,- atau 92,68%.

18. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), telah dilaksanakannya Diklat Perkoperasian dan Diklat Kewirausahaan untuk meningkatkan wawasan Pengurus dan pengelola koperasi. Jumlah peserta sebanyak 471 orang dibagi menjadi 12 Angkatan. Kegiatan ini merupakan alokasi dana DAK Non Fisik Tahun 2016.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 81%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.1.201.445.000,- atau 80,1%.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UMKM di Provinsi Riau

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Pertumbuhan UMKM di Provinsi Riau	544.281 unit	535.139 unit	99

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

Dari table di atas terlihat bahwa capaian dari indicator kinerja sasaran jumlah UMKM di Provinsi Riau adalah 535.139 unit atau 99%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain :

1. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dan Diseminasi Terhadap KUMKM Penerima Dana Bergulir

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Diseminasi terhadap KUMKM penerima Dana Bergulir sehingga diketahuinya perkembangan dana bergulir, tersalurnya dana bergulir sesuai sasaran dan pengembalian dana bergulir dan untuk mengetahui pelaksanaan dan perkembangan dana bergulir yang disalurkan pemerintah Provinsi Riau dan Bank pelaksana, merumuskan permasalahan dan penyempurnaan regulasi agar dapat mengambil langkah-langkah penyempurnaan penyaluran dan pengembalian dana bergulir serta mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan tidak lancarnya pengembalian dana bergulir.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 71%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.203.282.000,- atau 70,44%.

2. Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat

Koordinasi Akses Permodalan bagi KUMKM dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat, telah dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan pengelola Koperasi dan UMKM untuk memanfaatkan dana-dana bergulir sehingga dapat meningkatkan modal usahanya.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.60.983.000,- atau 63,89%.

3. Pameran Dalam Rangka Hari Koperasi Tingkat Nasional

Pameran Dalam rangka hari Koperasi Tingkat Nasional, yang dilaksanakan pameran Hari Koperasi Tingkat Nasional ke 69 Tahun 2016 tanggal 21-24 Juli 2016 bertempat di Halaman Kantor Gubernur Jambi Jl. A. Yani No.1 Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi yang menampilkan produk-produk khas daerah dengan mengikutsertakan 4 (empat) KUMKM dari Kab/Kota yaitu Kab. Kep. Meranti, Kab. Kuansing, Kab. Rokan Hulu dan dari Kota Pekanbaru.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 82%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.177.388.000,- atau 81,79%.

4. Pameran Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo)

Pameran Produk-produk Unggulan Khas Daerah, dengan menyebarluaskan informasi dan promosi produk kepada konsumen dan masyarakat bisnis, menampilkan tentang produk-produk Koperasi dan UMKM dari masing-masing Kabupaten/Kota dilaksanakan bersempena tanggal 24 Oktober s/d 30 Oktober 2016 di SKA CO EX Convention dan Exhibition Centre Komplek SKA – Mall Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru

dan dengan adanya pameran tersebut diharapkan terbukanya peluang untuk melakukan kontak bisnis

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 90%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.196.095.600,- atau 89,68%.

5. Pameran Dalam Rangka Hari Koperasi Tingkat Provinsi Riau

Pameran dalam rangka Hari Koperasi ke 69 Tingkat Provinsi Riau dilaksanakan di pada tanggal 11 – 14 Agustus di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Pameran dalam rangka hari koperasi Tingkat Provinsi.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 60%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.133.811.000,- atau 57,54%.

6. Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penyuluhan kepada pedagang kaki lima, dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota yaitu Pelalawan, Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru sebanyak 240 Pedagang Kaki Lima, Penyuluhan dilaksanakan untuk pemberdayaan pedagang kaki lima agar mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya dan perlu diberi penyuluhan untuk memperhatikan kepentingan sosial, kesehatan, ekonomi, keamanan ketertiban, kebersihan lingkungan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terlaksananya pemahaman kepala PKL

terhadap Peraturan presiden RI Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.88.530.400,- atau 96,4%.

7. Penyuluhan Kepada Lembaga Keuangan Mikro

Penyuluhan kepada Lembaga Keuangan Mikro, kegiatan dilaksanakan dalam rangka penyuluhan pemahaman pada LKM untuk memiliki wadah usaha yang berbadan hukum koperasi. Diharapkan LKM dapat mendirikan koperasi sesuai UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 80%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.105.606.500,- atau 77,63%.

8. Monitoring Dan Evaluasi Bansos

Monitoring dan Evaluasi Bansos, kegiatan dilaksanakan dalam rangka bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada penerima bantuan permodalan.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 63%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.47.477.000,- atau 62,37%.

9. Pameran Produk-produk Unggulan Khas Daerah

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.282.911.700,- atau 76,27%.

10. Pelatihan Kerajinan Rumah Tangga (Home Industri) bagi Kelompok Pengrajin dalam Peningkatan Usaha Kelompok di Daerah

Pelatihan Kerajinan Rumah Tangga (Home Industri) bagi Kelompok pengrajin dalam Peningkatan Usaha Kelompok di Daerah, kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan UMKM bidang kerajinan souvenir dan penghias mebel di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kab. Rokan Hilir dan Kab. Indragiri Hilir dari limbah batok kelapa/tempurung dengan jumlah peserta 60 orang masing-masing daerah terdiri dari 20 orang dan kerajinan anyaman pandan dengan jumlah peserta 20 orang dilaksanakan di Kota Dumai.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.461.577.400,- atau 95,11%.

11. Temu Konsolidasi Data dan Pemberdayaan UKM

Temu Konsultasi Data Pemberdayaan UKM, kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka untuk koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pembinaan teknis pengumpulan dan pelaporan data UMKM dan sebagai bahan informasi bagi Dinas Koperasi dan UMKM dan Instansi Terkait yang dapat menjadi acuan dalam rangka pengembangan UMKM dimas yang akan datang.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.114.223.872,- atau 93,12%.

**12. Peningkatan Mutu Kemasan (Packaging) Produk Unggulan se
Provinsi Riau**

kegiatan telah dilaksanakan dengan capaian kinerja untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga dapat meningkat kualitas kemasan produk UMKM unggulan di daerahnya masing-masing sehingga produk yang dihasilkan tidak kalah bersaing dengan produk luar dan dapat meningkatkan omset penjualan produk UMKM yang dilaksanakan di Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kab. Kuantan Singingi dan Kab. Siak bagi pelaku UMKM yang telah memiliki produk dengan peserta masing-masing daerah 40 orang.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 50%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.83.044.000,- atau 47,64%.

13. Workshop Wirausaha

kegiatan telah dilaksanakan workshop wirausaha dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan wirausaha untuk mewujudkan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil dan menengah terutama dalam penyusunan rencana bisnis dan penyusunan proposal usaha untuk mendapatkan skim pembiayaan baik dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.93.221.000,- atau 68,82%.

14. Penyediaan dan Pengembangan Sarana untuk Usaha Koperasi dan UMKM provinsi Riau

Kegiatan telah dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan bagi wirausaha, dengan capaian kinerja untuk meningkatkan keterampilan usaha di bidang kerajinan tangan dan makanan sehingga UMKM mengembangkan usahanya dan juga untuk mewujudkan wirausaha baru yang terampil.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 73%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.239.722.188,- atau 72,24%.

15. Pengadaan Klinik Desain Kemasan

kegiatan tidak terlaksana karena merupakan kegiatan hibah/bansos yang tidak memenuhi persyaratan.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 12%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.32.186.200,- atau 11,2%.

16. Peningkatan Galeri PLUT-KUMKM Provinsi Riau

Merupakan kegiatan dukungan pengisian Gallery PLUT sebagai tempat Promosi dan Pemasaran Produk unggulan KUKM se Provinsi Riau.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 60%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.87.928.800,- atau 58,83%.

17. Pembuatan dan Pencantuman Label Barcode bagi Produk Unggulan UMKM

Pembuatan dan Pencantuman label barcode bagi Produk Unggulan UMKM, kegiatan telah dilaksanakan dengan tujuan untuk pencantuman label pada Produk-produk UMKM sehingga produk-produk yang dihasilkan berlabel barcode.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 63%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.236.098.000,- atau 78,16%.

18. Konsultasi Bisnis dan Teknis untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau

Kegiatan yang sudah terlaksana:

1. Bimtek Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi bagi Wirausaha dalam Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Produk secara Online (Angkatan I dan II)
2. Bimtek Strategi Pengembangan Bisnis bagi wirausaha (Angkatan I)
3. Bimtek Strategi Pengembangan Bisnis bagi wirausaha (Angkatan II dan III)

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 62,5%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.97.602.000,- atau 44,57%.

Realisasi Anggaran per 31 Desember 2016

No.	Program	Lokasi	Realisasi s.d. 31 Desember 2016
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.852.586.409	Rp. 1.586.496.650 (85,64%)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 1.139.408.654	Rp. 970.469.850 (85,18%)
3.	Program peningkatan disiplin Aparatur	Rp. 233.642.172	Rp. 228.868.400 (97,96%)

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
PROVINSI RIAU**

No.	Program	Lokasi	Realisasi s.d. 31 Desember 2016
4.	Program Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 193.153.123,90	Rp. 94.297.100 (48,82%)
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 563.722.409,13	Rp. 185.113.100 (32,84%)
6.	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Rp. 384.046.332,65	Rp. 264.265.000 (68,81%)
7.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp. 1.343.063.078,90	Rp. 1.031.820.200 (76,83%)
8.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 2.207.504.692,76	Rp. 1.445.603.460 (65,49%)
	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	Rp. 15.549.254.311,67	Rp. 12.292.563.115 (79,06%)
JUMLAH			

No.	Program	Lokasi	Realisasi s.d. 31 Desember 2016
------------	----------------	---------------	--

*) Tidak Termasuk Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 15.549.254.311,67

Realisasi anggaran tersebut hanya menyangkut pagu anggaran Belanja Langsung (BL), tidak termasuk dana Belanja Tidak Langsung (BTL).

Adapun penjelasan mengenai Realisasi anggaran, sebagai berikut :

Secara system tidak ada hambatan/kendala dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja karna sebagian besar kegiatan secara fisik terlaksana mencapai 100%, hanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan alasan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak cukup dan data yg di DPA tdk sesuai dengan yang dilapangan, serta ada beberapa penerbitan pergub sehingga kegiatan tidak memenuhi pergub tersebut.

Untuk itu, beberapa langkah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau untuk mengatasi kendala penyerapan anggaran ini antara lain :

1. Menyusun aturan pola pelaksanaan kegiatan dengan mewajibkan kepada setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan lebih awal.

2. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal.
3. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketetapan waktu pelaksanaan.

Penjelasan mengenai Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Riau dijabarkan dalam tabel berikut ini:

A. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada tahun 2016 telah terjadi perubahan nomenklatur pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, yang semula bernama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau merupakan dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau tidak dapat memberikan penjelasan pada subbab Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, karena subbab ini berisikan tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.

**Tabel T-VI.C.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Provinsi Riau**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun ... (thn n-2)	Tahun ... (thn n-1)	Tahun ... (thn n)	Tahun ... (thn n+1)	Tahun ... (thn n-2)	Tahun ... (thn n-1)	Tahun ... (thn n)	Tahun ... (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

**a. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau**

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau ditentukan melalui Focused Group Discussion (FGD) yang melibatkan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang serta para Kepala Seksi. Isu- isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau terpetakan sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas widyaiswara bidang koperasi dan UKM masih terbatas.
2. Komitmen dari para stakeholder terhadap pengembangan koperasi dan UMKM masih rendah.
3. Infrastruktur untuk koperasi dan UMKM masih kurang memadai.
4. Kapasitas manajemen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih belum optimal.
5. Anggaran untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih terbatas.
6. Kurangnya koordinasi berbagai pihak baik internal maupun eksternal dalam pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Kurangnya dana yang bisa dijamin oleh PT. Jaminan Kredit Dinas Riau terhadap para UMKM.
8. Masih banyak Kabupaten/Kota yang belum mempunyai PLUT.

Isu-isu tersebut yang harus ditindaklanjuti pada Rencana Kerja pada Tahun kedepan adalah :

Pembinaan Koperasi dan UMKM kurang optimal karena aspek dukungan yang belum kondusif antara lain terbatasnya modal dan tingginya bunga pinjaman;

Kebutuhan akan pendidikan dan latihan bagi Koperasi dan UMKM, termasuk penguatan manajerial lembaga koperasi, dirasakan makin meningkat sementara sarana dan prasarana masih terbatas

Review terhadap rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau Tahun 2017 yang mengimplementasikan perencanaan penganggaran tahunan dapat dilihat pada Tabel berikut :

i. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau terdapat 2 (dua) permasalahan utama yang kemudian dijadikan fokus kebijakan untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan nilai investasi sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan RPJMD tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

Pemetaan permasalahan utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terbagi atas 2 pokok permasalahan dalam merealisasikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2014-2019 yaitu.

- a) Masih belum optimalnya pemberdayaan Koperasi dan UKM
- b) Masih belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) dan pro environment. Permasalahan bagi perdagangan terletak dalam nilai ekspor dan stabilitas harga sedangkan permasalahan koperasi dan UKM adalah pada pemberdayaan dan akses.

Jumlah koperasi di Provinsi Riau cenderung meningkat setiap tahunnya dengan pertumbuhan 3,47%, dimana pada tahun 2011 sebanyak 4.792 meningkat menjadi 5.271 unit seperti terlihat pada Tabel 2.112 Sementara jumlah anggota mengalami penurunan dari 610.749 orang pada tahun 2011 menjadi 541.731 orang pada tahun 2015 atau turun sebanyak 2,73%. Koperasi yang dibentuk belum mampu menjadi koperasi aktif, Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian untuk mendapatkan pembinaan, karena koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang dapat langsung menyentuh masyarakat.

Tabel 3.1 Perkembangan Koperasi Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015

No	Investasi	Perkembangan					Pertumbuhan (%/Thn)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah koperasi	4.792	5.013	6.125	4.993	5.271	3,47
	Koperasi Aktif	-	-	-	-	3.099	
	Anggota	610.749	608.468	629.567	545.025	541.731	(2,73)
	Modal Sendiri (Rp. Juta)	641.052	726.108	842.723	1.152.374	1.103.553	15,46
	Modal Luar (Rp. Juta)	1.609.952	1.715.236	1.636.660	1.905.988	2.389.091	10,94
	Volume Usaha (Rp. Juta)	2.279.604	2.348.918	2.379.019	3.314.885	2.960.121	8,24
	SHU (Rp. Juta)	106.564	129.150	138.253	182.829	173.534	13,85
2	Jumlah UMKM	484.289	490.396	-	-	-	-

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Sedangkan perkembangan kinerja sektor Perdagangan Provinsi Riau juga masih belum optimal walaupun selama 5 tahun terakhir kontribusinya terhadap PDRB selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 kontribusi perdagangan terhadap PDRB sebesar 7,65 % meningkat menjadi 8,65 % tahun 2015.

Tabel 3.2 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Riau

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,65	8,19	8,43	8,48	8,65	3,08

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Riau memiliki trend meningkat dengan pertumbuhan 3,08% per tahun. Dimana pada tahun 2011 sebesar 7,65% kemudian meningkat menjadi 8,65% pada tahun 2015 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.3 Ekspor dan Impor Menurut Komoditas Provinsi Riau Tahun 2015

No	Komoditas	Eskpor		Impor		Ekspor Netto	
		Berat (Ton)	Nilai (US\$ ribu)	Berat (Ton)	Nilai (US\$ ribu)	Berat (Ton)	Nilai (US\$ ribu)
1	Migas	-	24.109.347	-	390.280.739	-	(360.489.061)
2	Non Migas	80.918.023	52.257.512	12.122.084	7.467.137	28.660.511	44.790.375

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015) BRS, 2016

Pendapatan daerah dari dana bagi hasil migas yang tidak berkesinambungan selayaknya ditopang dengan ekspor non-migas, Sehingga perlu upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan ekspor dari sektor non migas. Usaha lain yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan daya saing produk melalui program peningkatan citra merek dagang, diversifikasi produk dan pengembangan produk

dan jasa, Pembinaan pelaku ekspor, di samping untuk menguasai teknis-teknis perdagangan internasional juga dipandang perlu untuk memberikan pengetahuan mengenai perdagangan internasional.

Berangkat dari alasan tersebut di atas, maka aspek lingkungan strategis dari semua aspek dalam skala nasional maupun internasional sangat berpengaruh dalam penyusunan program dan kegiatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4 Aspek Lingkungan Strategis

Aspek Lingkungan Strategis		
Aspek Politik	Aspek Ekonomi	Aspek Sosial
<ul style="list-style-type: none">• Pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Perdagangan, Koperasi dan UKM.	<ul style="list-style-type: none">• Kontribusi Perdagangan dan UKM terhadap pembentukan PDRB provinsi Riau.• Pengembangan UKM dalam penyerapan investasi• Kontribusi UKM dalam ekspor non migas	<ul style="list-style-type: none">• UKM telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja• Penekanan pengangguran menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru

Ada 4 (empat) faktor pengubah (change driver) dari luar yang akan membentuk kondisi lingkungan strategis yaitu faktor ekonomi, politik, sosial, dan perkembangan teknologi. Pengaruhnya masing-masing dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 3.5 Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Eksternal

Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Eksternal	
<i>Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Politik</i>	
Potensi	Permasalahan
Pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UKM.	Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010, juga dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar dan masih rendahnya daya saing produk Koperasi dan UKM di pasar internasional
<i>Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Ekonomi</i>	
Potensi	Permasalahan
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau memiliki jangkauan dukungan permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah sampai ke berbagai pelosok.	Pendanaan utamanya Koperasi dan UKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas.
Tersedianya plafon kredit yang besar di lembaga keuangan bank dan non bank (kebijakan pemerintah pusat)	Jasa lembaga keuangan yang sebagian besar berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama)
<i>Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Sosial</i>	
Potensi	Permasalahan
Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sektor ini	Kurang kondusifnya iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum

Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Eksternal	
<i>Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Politik</i>	
Potensi	Permasalahan
telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru	tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk Usaha Kecil dan Menengah.
Pengembangan berbagai bentuk kerjasama, salah satunya dengan alih teknologi	Kebanyakan Perdagangan, Koperasi dan UKM menggunakan teknologi sederhana, Kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk

Adapun pengaruh lingkungan strategis internal dapat dibagi berdasarkan peran-peran dalam melaksanakan penugasan atau mandat yang menjadi tanggung jawab kelembagaan, yaitu:

- a) Sebagai SKPD dengan lingkup peran dan tanggung jawab sebagai “think-tank” atau pengkonsep dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- b) Sebagai SKPD pemberi pelayanan umum dan pelayanan teknis bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- c) Sebagai SKPD yang harus mengelola sumber daya yang dimiliki secara profesional dan akuntabel, khususnya pada pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur dan kelembagaan, dalam rangka perwujudan Good Governance bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 3.6 Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Internal

Rencana Kerja SKPD Tahun 2018

Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Internal	
<i>Peran sebagai Think-Tank</i>	
Potensi	Permasalahan
Peraturan Teknis tentang Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sosialisasi terkait kebijakan yang dihasilkan belum dilakukan secara maximal kepada seluruh stake holder yang terlibat dan kepada para pelaku usaha, koperasi dan UKM Belum dilakukannya M/E (monitoring/evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang telah dibuat.
<i>Peran sebagai pelayanan</i>	
Potensi	Permasalahan
Memiliki UPT	Jumlah UPT dan aparatur Pembina koperasi dan UKM tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi sebanyak 5.106 koperasi dan 525.800 UKM (data 2013) di Provinsi Riau.
<i>Peran sebagai pengelola</i>	
Potensi	Permasalahan
Terdapat sumber daya manusia yang cukup dari segi kuantitasnya dan sarana-prasarana penunjang lain yang selama ini menjadi modal dasar dalam Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kualitas dan kompetensi SDM belum secara optimal sesuai kompetensinya, dan bahkan juga belum secara optimal mendukung fungsi sebagai penyusun kebijakan teknis bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kondisi lingkungan strategis internal kelembagaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau diperkirakan akan memberikan gambaran potensi dan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Potensi dan permasalahan Terkait Kelembagaan

Potensi dan Permasalahan Terkait Kelembagaan	
Potensi	Permasalahan
Jumlah pelaku usaha yang ada di Provinsi Riau, 5.106 koperasi dan 525.800 UKM (data 2013) di Provinsi Riau. Kondisi ini menggambarkan bahwa peluang dan potensi Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sangat strategis yang sebagian besar kapasitas SDMnya adalah dengan kelas menengah kebawah dan latar belakang pendidikan rendah.	Mayoritas SDM yang dimiliki berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya
Jumlah pelaku usaha koperasi dan UKM yang sebanyak 5.106 koperasi dan 525.800 UKM (data 2013) di Provinsi Riau, merupakan peluang yang sangat besar untuk dibina dan dikembangkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai motor penggerak ekonomi nasional	Jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi dan UKM
SDA (hutan, lahan atau tanah, potensi pertambangan, potensi perairan dan kelautan, dan berbagai potensi lainnya) yang dimiliki Provinsi Riau menjadi	Terbatasnya akses Perdagangan Koperasi dan UKM kepada sumberdaya produktif terutama terhadap

Potensi dan Permasalahan Terkait Kelembagaan	
Potensi	Permasalahan
potensi produktif yang penyebarannya yang hampir merata pada semuanya wilayah terutama di wilayah pedesaan. Semestinya rakyat yang sebagian besar berdomisili di wilayah pedesaan berada pada posisi yang paling menguntungkan dalam menikmati kekayaan alam tersebut.	bahan baku, 'permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar.

ii. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2014-2019 disebutkan bahwa Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau adalah

**“TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU YANG MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA
SAING TINGGI, MENURUNNYA KEMISKINAN, TERSEDIANYA LAPANGAN KERJA SERTA
PEMANTAPAN APARATUR”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. Maju : Tersedia sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta berteknologi tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Sejahtera : Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan keamanan.
3. Berdaya Saing : Suatu kondisi pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya, tatanan sosial yang agamis.
4. Menurunnya kemiskinan : Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
5. Lapangan Kerja : Tersedianya peluang dan kesempatan bagi angkatan kerja melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
6. Pemantapan Aparatur : Meningkatkan Profesionalisme dan etos kerja dalam memberikan pelayanan prima menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 – 2019, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.
4. Menurunkan Kemiskinan.
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya.
6. Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa serta Pemantapan Kehidupan Politik.
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan.
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pariwisata.

**iii. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau**

iv. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya seperti capaian kinerja rencana strategis, peluang dan tantangan yang dihadapi, permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD dan telaah terhadap visi dan misi Gubernur maka isu-isu strategis di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja belum terlaksana secara efisien dan efektif;
3. Kompetensi sumber daya aparatur belum optimal

4. Komitmen dari para stakeholder terhadap pengembangan koperasi dan UKM masih rendah.
5. Infrastruktur untuk koperasi dan UKM masih kurang memadai.
6. Stabilitas harga yang harus terjaga
7. Peningkatan daya beli masyarakat

b. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tidak terdapat perbedaan mendasar antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2017. Penjelasan mengenai review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 Provinsi Riau tertuang dalam Tabel.T-VI.C.7.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah	2600 lbr materai 6000, 324 lbr materai 3000 dan 800 kilat khusus pengiriman surat	21.372.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah	2600 lbr materai 6000, 324 lbr materai 3000 dan 800 kilat khusus pengiriman surat	21.372.000	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah	6543 volume	421.402.500	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah	6543 volume	421.402.500	

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
PROVINSI RIAU**

4	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah	blj air 1100ub dan mkn 2250 ktk	73.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah	blj air 1100ub dan mkn 2250 ktk	73.250.000	
5	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah	12 Kab/Kota, Jakarta, Luar Jkt	757.602.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah	12 Kab/Kota, Jakarta, Luar Jkt	757.602.000	
6	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	2 no telp, 1 jaringan internet dan faksimili	34.068.000	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	2 no telp, 1 jaringan internet dan faksimili	34.068.000	
7	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, publikasi dan Kehumasan SKPD	Pekanbaru	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	12 bulan	75.448.500	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, publikasi dan Kehumasan SKPD	Pekanbaru	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	12 bulan	75.448.500	
8	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	4 laporan	377.255.600	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	4 laporan	377.255.600	

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
PROVINSI RIAU**

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas Pemda	9 unit mobil dinas	247.440.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas Pemda	9 unit mobil dinas	247.440.000	
10	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah	Service - komputer 30 unit ,service mesin foto copi 4 unit dan service laptop 15 unit	108.100.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah	Service - komputer 30 unit ,service mesin foto copi 4 unit dan service laptop 15 unit	108.100.000	
11	Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah	12 bulan	371.455.000	Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah	12 bulan	371.455.000	
12	Peningkatan pelayanan, sarana	Pekanbaru	Meningkatnya	12 bulan	335.430.000	Peningkatan pelayanan,	Pekanbaru	Meningkatnya efektivitas	12 bulan	335.430.000	

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
PROVINSI RIAU**

	dan prasarana gedung Kantor UPT Pusat Pelayanan Terpadu		efektivitas dan integritas pemerintah daerah			sarana dan prasarana gedung Kantor UPT Pusat Pelayanan Terpadu		dan integritas pemerintah daerah			
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
13	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Pekanbaru	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	80 orang	77.093.000	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Pekanbaru	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	80 orang	77.093.000	
VI	Program Penciptaan Iklim					Program Penciptaan					

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
PROVINSI RIAU**

	Usaha Kecil menengah Yang Kondusif					Iklim Usaha Kecil menengah Yang Kondusif					
14	Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	100 Orang	168.339.100	Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	100 Orang	168.339.100	
VII	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM					
15	Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 KUMKM	75.849.200	Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 KUMKM	75.849.200	
VIII	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
PROVINSI RIAU**

16	Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 kabupaten/kota	51.245.000	Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 kabupaten/kota	51.245.000	
17	Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 kabupaten/kota	3.479.068.000	Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 kabupaten/kota	3.479.068.000	
18	Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 kabupaten/kota	116.261.700,00	Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 kabupaten/kota	116.261.700,00	
19	Diklat Perkoperasian	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 kabupaten/kota	101.911.800,00	Diklat Perkoperasian	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 kabupaten/kota	101.911.800,00	
IX	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif					

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
PROVINSI RIAU**

						KUMKM					
20	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 Kab/kota	275.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Provinsi Riau	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 Kab/kota	275.000.000	
21	Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau	12 Kabupaten/kota	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 Kabupaten/kota	106.479.800	Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau	12 Kabupaten/kota	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 Kabupaten/kota	106.479.800	
X	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan					Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan					
22	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Provinsi Riau	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	250 Toko Pengawasan Berkala, 50 Toko Pengawasan Dalam Rangka Menghadapi Hari Besar dan 50 Gudang di 12 Kab/Kota	165.817.400	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Provinsi Riau	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	250 Toko Pengawasan Berkala, 50 Toko Pengawasan Dalam Rangka Menghadapi Hari Besar dan 50 Gudang di 12 Kab/Kota	165.817.400	
XI	Program					Program					

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
PROVINSI RIAU**

	Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor					Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor					
23	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB	Provinsi Riau	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	5 Laboratorium	426.242.000	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB	Provinsi Riau	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	5 Laboratorium	426.242.000	
24	Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai dan Sarana Teknis Laboratorium UPT. PSMB	Pekanbaru	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12 bulan	221.700.000	Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai dan Sarana Teknis Laboratorium UPT. PSMB	Pekanbaru	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12 bulan	221.700.000	
25	Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB	Pekanbaru	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12 bulan	115.438.000	Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB	Pekanbaru	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12 bulan	115.438.000	
26	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se- Provinsi Riau	Provinsi Riau	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12 Kab/Kota	115.000.000	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se- Provinsi Riau	Provinsi Riau	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12 Kab/Kota	115.000.000	
XII	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					

**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
PROVINSI RIAU**

27	Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi	Provinsi	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	12 Kab/Kota	157.133.900	Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi	Provinsi	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	12 Kab/Kota	157.133.900	
----	--	----------	----------------------------------	-------------	-------------	--	----------	----------------------------------	-------------	-------------	--

c. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan tidak lepas dari peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan baik di strata Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, selain itu juga dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, LSM, maupun Asosiasi sehingga terjadi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Daftar usulan Program dan Kegiatan Masyarakat serta hasil Forum SKPD Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau terdapat pada tabel berikut ini :